



## BAB IV

### PRIORITAS dan SASARAN PEMBANGUNAN

*Bagian ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.*

Prioritas pembangunan Kota Mataram pada tahun 2019 merupakan prioritas pembangunan tahun ketiga RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional.

Perumusan prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2019 dilakukan dalam rangka mencapai Visi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016-2021 yaitu:

**“Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju, Religius Dan Berbudaya”.**

Dalam visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci, yaitu:

1. **Kota Mataram**, adalah sasaran pembangunan yaitu wilayah Kota Mataram termasuk didalamnya warga kota yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Mataram. Artinya Kota Mataram dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dengan segala konsekuensi keberadaannya sebagai warga kota.
2. **Maju**, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mataram.
3. **Religius**, diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.
4. **Berbudaya**, diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktifitas sehari-hari disemua tempat. Masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan nenek moyang dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga tercipta keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.

Visi Kota Mataram Tahun 2016-2021 tersebut selaras dan sinkron dengan keadaan yang ingin dicapai Kota Mataram tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang



RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 yang menjabarkan Visi Kota Mataram Tahun 2005-2025 yaitu **“Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025”**.

Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025 dimaksudkan untuk percepatan dan pemantapan pembangunan dengan menekankan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan publik dan sarana prasarana sebagai pusat pemerintahan di NTB serta terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Mataram tahun 2016-2021, ditetapkan 5 (lima) Misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai, yaitu:

- Misi 1** Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Rukun dan Damai.
- Misi 2** Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek Dalam Rangka Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing.
- Misi 3** Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.
- Misi 4** Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan.
- Misi 5** Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

Dalam upaya mencapai visi misi pembangunan jangka menengah serta dengan memperhatikan evaluasi kinerja pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2017 dan mempertimbangkan isu strategis Tahun 2019 serta memperhatikan tema pembangunan Nasional tahun 2019, maka tema pembangunan Kota Mataram tahun 2019 adalah:

**“MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SDM DAN INFRASTRUKTUR  
UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING BERBASIS KREATIFITAS  
DALAM RANGKA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL”**

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

Sasaran utama pembangunan Kota Mataram yang akan dicapai tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi dipertahankan pada kisaran angka 8
2. Laju Inflasi dipertahankan pada kisaran  $4 \pm 1$
3. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun mencapai angka 9 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan turun pada angka kisaran 5 persen

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPDP Tahun 2019 merupakan penjabaran Misi Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam periode ketiga RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021. Secara lebih rinci keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai	Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya situasi keamanan, kerukunan, yang kondusif</li> <li>2. Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat</li> <li>3. Terwujudnya pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah</li> </ol>
2	Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan IPTEK dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif</li> <li>2. Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas</li> <li>3. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak</li> <li>4. Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat</li> </ol>
3	Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi penampakan sumberdaya lokal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan</li> <li>2. Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif</li> </ol>
4	Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang perekonomian dan sosial yang memadai</li> </ol>
5	Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang profesional, berintegritas dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik</li> <li>2. Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah</li> </ol>

Sumber: Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Mataram 2016-2021

## 4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN

### 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas pembangunan Nasional tahun 2019 merupakan prioritas pembangunan tahun kelima RPJMN tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Dengan



mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka Visi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 adalah:

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.**

Upaya untuk mewujudkan Visi adalah melalui penerapan 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam upaya mencapai Visi, Misi pembangunan menengah serta berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKP tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMN dan mempertimbangkan isu strategis dan identifikasi permasalahan yang ada, maka tema pembangunan tahun 2019 adalah:

**“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**

Berdasarkan tema tersebut, Penyusunan RKP tahun 2019 dilakukan dengan Perkuatan pelaksanaan kebijakan *Money Follow Program* melalui pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial dengan memperhatikan:

- Pengendalian perencanaan;
- Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2019;
- Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan;
- Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Lebih jauh, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang memuat antara lain:

- Perkuatan kendali program. Perencanaan pendanaan dilakukan pada prioritas pembangunan hingga tingkat pelaksanaan (keluaran dan lokus yang jelas)
- Pengintegrasian sumber – sumber pendanaan baik belanja pusat (K/L dan Non K/L), transfer ke daerah maupun non APBN
- Memperkuat koordinasi antar instansi dan antar pusat daerah dengan memfokuskan pembahasan pada prioritas pembangunan agar :
  - ✓ Kesiapan pelaksanaan program dibahas sejak awal



- ✓ Integrasi antar program dan antar pelaku pembangunan
- Mengintegrasikan dokumen perencanaan, dokumen anggaran serta penilaian kinerja dalam sebuah rangkaian sistem yang terpadu (KRISNA).

Asumsi Ekonomi Makro yang diskenariokan pada Tahun 2019 yaitu:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar diperkirakan mencapai rentang 5,5 – 6,5 persen
2. Laju inflasi kisaran 2,5 – 4,5 persen dengan tren menurun;
3. Nilai tukar (USD/IDR) diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp.13.500 – Rp. 14.000.
4. Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price / ICP) diperkirakan berada pada kisaran harga 45 - 65 USD per barrel;
5. Lifting minyak diperkirakan relatif stabil pada kisaran 722 – 850 ribu barrel per hari;
6. Lifting Gas diperkirakan relatif stabil pada kisaran 1.210 – 1.300 ribu barrel per hari.

Skenario target nasional diatas disusun dengan asumsi terjadi perbaikan ekonomi global dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi peningkatan harga minyak dunia yang lebih tinggi dari target dapat berdampak positif terhadap penerimaan namun juga dapat menimbulkan tekanan bagi kenaikan inflasi nasional.

Selanjutnya, dalam Rancangan RKP tahun 2019 telah ditetapkan 5 Prioritas Nasional dan arah kebijakan, sebagai berikut:

- **Prioritas Nasional 1** : Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.  
dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
  - a. Mempercepat Pengurangan Kemiskinan
  - b. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
  - c. Memeratakan Layanan Pendidikan Berkualitas
  - d. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak:
  - e. Meningkatkan Tata Kelola Layanan Dasar
- **Prioritas Nasional 2** : Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman  
dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi
  - b. Meningkatkan sistem logistik
  - c. Mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa
  - d. Mempercepat Pembangunan Papua dan Papua Barat
  - e. Menanggulangi dampak bencana
- **Prioritas Nasional 3** : Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif

dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian
  - b. Mempercepat Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan
  - c. Meningkatkan Nilai Tambah Jasa Produktif
  - d. Mempercepat Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
  - e. Mengembangkan Iptek dan Inovasi untuk meningkatkan Produktivitas
- **Prioritas Nasional 4** : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
    - a. Meningkatkan produksi energy primer
    - b. Meningkatkan peranan energy baru terbarukan dalam bauran energy
    - c. Meningkatkan aksesibilitas energi
    - d. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energy dan listrik
    - e. Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri
    - f. Meningkatkan layanan pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana prasarana, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan, pemanfaatan inovasi teknologi, serta perkarantinaaan (2 KP)
    - g. Memperkuat distribusi dan stabilitasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat
    - h. Mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan dengan penyediaan pangan yang beragam dan bergizi dengan sumber daya lokal
    - i. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air
    - j. Memberi perlindungan pada sumber air dan ekosistemnya
    - k. Memenuhi kebutuhan air yang adil dan merata
    - l. Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS
    - m. Meningkatkan kesadaran terkait air.
  - **Prioritas Nasional 5** : Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum. dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
    - a. Memantapkan Kamtibmas dan Keamanan Siber
    - b. Memantapkan Kamtibmas dan Keamanan Siber
    - c. Memperkuat Pertahanan Wilayah Nasional
    - d. Meningkatkan Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi
    - e. Meningkatkan Efektivitas Diplomasi

#### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi NTB

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Sembilan Penyusunan RKPD bagi Daerah yang Belum memiliki RKPD, Pasal 147 Ayat 1 disebutkan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi, Penyusunan RKPD berpedoman pada



arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMD untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Provinsi dengan pembangunan Nasional.

Visi pembangunan jangka panjang Nusa Tenggara Barat dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah “**Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman ,Maju Dan Sejahtera**” Visi tersebut diwujudkan dengan 5 (lima) misi, yaitu : Misi 1 Mewujudkan masyarakat beriman, bermorak, be rbudaya dan berkesadaran ; Misi 2 Mewujudkan masyarakat sejahtera,; Misi 3 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, ; Misi 4 Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah ; Misi 5 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan .

Untuk dapat memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, ditentukan sasaran pokok pada setiap misi beserta arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1 : **Terwujudnya masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum**, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peranan lembaga pemerintahan sebagai regulator yang diikuti dengan semakin menurunnya peranan sebagai pelaku kegiatan di masyarakat.
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan beorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang dinamis, berkeadilan, aman, tertib, dan harmonis.
5. Makin mantapnya peranan budaya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan arah kebijakannya sebagai berikut :

a Mewujudkan masyarakat yang tangguh, kompetitif dan bermoral tinggi berdasarkan nilai-nilai Agama dan nilai budaya. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi :

- Pemantapan fungsi dan peranan agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kemajuan dan pembangunan.
- Peningkatan fungsi dan peran tokoh-tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok agama dan kelompok masyarakat.
- Penguatan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga budaya dalam peningkatan pembinaan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.



- Penguatan fungsi dan peran tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan, pedesaan, dan kawasan rentan konflik.
- b Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi :
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - Peningkatan, pemantapan, dan penguatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hukum dan HAM.
  - Pemantapan dan penguatan peran lembaga sosial masyarakat dalam turut bertanggung jawab dan berperan aktif menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan polisi.
  - Peningkatan kualitas kelembagaan dan profesionalisme pamswakarsa.
- c Memantapkan peranan budaya dalam pembangunan daerah. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi :
- Penataan pembangunan budaya daerah dan sistem sosial yang berakar dan unik, seperti religius, kebersamaan, dan persatuan.
  - Revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya daerah yang unggul. □ Pengembangan bentuk-bentuk pengungkapankreativitas melalui kesenian dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia.
  - Pengembangan budaya iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dan budaya produktif.
- d Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi :
- Peningkatan fasilitasi akses masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan dan pelibatan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan pembangunan daerah.
  - Peningkatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hak-haknya sebagai warga negara serta bentuk-bentuk perilaku merasa memiliki “daerahnya” dan taat hukum.
  - Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan.



Indikator keberhasilan dari misi ini adalah menurunnya konflik antar kelompok masyarakat dan antar umat beragama, menurunnya angka indeks kriminalitas, meningkatnya indeks kesetaraan gender, menurunnya angka korban kekerasan dalam rumah tangga dan trafficking, meningkatnya aktivitas berkesenian dan apresiasi budaya masyarakat, meningkatnya minat baca masyarakat, dan meningkatnya rasio jumlah perpustakaan dengan penduduk. **Misi 2 : Terwujudnya masyarakat sejahtera**, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita riil penduduk terus meningkat, tingkat pengangguran tidak lebih dari 5 persen dan angka kemiskinan dibawah 10 persen.
2. Terpenuhinya kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari buta huruf, keterampilan lulusan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, dan rata-rata lama sekolah penduduk menjadi 12 tahun.
4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari penyakit dasar, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita. Seluruh indikator kesehatan sama/mendekati rata-rata nasional.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjangnya adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan pangan dan gizi masyarakat. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
  - Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik jumlah maupun gizinya, aman, dan terjangkau.
  - Mengembangkan sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
  - Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi di daerah serta pemenuhan konsumsi seimbang.
  - Optimalisasi peran kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.
- b. Menyediakan kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
  - Penelitian dan pengembangan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari masyarakat dan lembaga keuangan formal dan non-formal.
  - Peningkatan dan optimalisasi kualitas pemukiman rakyat.



- Fasilitasi pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
  - Pemanfaatan dan pengembangan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari lembaga keuangan formal dan non-formal.
  - Optimalisasi pemanfaatan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari masyarakat.
- c Menyediakan lapangan kerja. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
- Penelitian dan pengembangan potensi angkatan kerja dan peluang lapangan kerja formal.
  - Peningkatan produktivitas dan penempatan tenaga kerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi.
  - Peningkatan pelayanan kesejahteraan pekerja di sektor informal.
  - Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak.
- Adapun prioritas lokasi meliputi daerah perkotaan, kawasan strategis industri dan kawasan agropolitan.
- d Meningkatkan kualitas penduduk. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
- Penelitian dan pengembangan database jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
  - Penataan sistem administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
  - Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas.
  - Penataan persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- e Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
- Penelitian dan pengembangan database pelayanan pendidikan di semua jenjang
  - Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dan semua jenjang pendidikan.
  - Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif.
  - Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
  - Keberlanjutan peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan kualitas hidup dan produktivitas penduduk, serta menumbuhkan kebanggaan kebangsaan dan akhlak mulia.
- f Meningkatkan pelayanan masyarakat. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :

- Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau pada setiap strata pelayanan pada berbagai tingkat wilayah.
  - Peningkatan promosi, pengobatan, rehabilitasi dan prevensi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. □ Penambahan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat. □ Peningkatan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan.
  - Peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan pemberdayaan profesi kesehatan.
- g Meningkatkan kesejahteraan sosial. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
- Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai.
  - Peningkatan kualitas kesejahteraan dan produktivitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
  - Peningkatan sistem pembiayaan sosial ekonomi masyarakat miskin/terlantar dan jaminan sosial daerah (Jamsosda) bagi PMKS.
  - Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  - Pengembangan dan penataan sistem perlindungan dan jaminan sosial untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan sosial dasar.
  - Penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat pasca bencana alam.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan.

Indikator keberhasilan dari misi ini adalah menurunnya angka gizi buruk dan gizi kurang; menurunnya angka kemiskinan hingga sama dengan rata-rata nasional; meningkatnya angka persentase kepemilikan rumah; menurunnya angka pengangguran hingga mencapai angka dibawah 5 persen; menurunnya angka pertumbuhan penduduk mendekati 0 persen; meningkatnya akses dan jutu pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah, meningkatnya lama sekolah menjadi 12 tahun, dan angka melek huruf diatas 95 persen; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi kurang gizi; menurunnya jumlah PMKS; dan meningkatnyafasilitas dan mutu pelayanan sosial masyarakat.

**Misi 3 : Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan**, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah di Nusa Tenggara Barat.
2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.



3. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025 adalah sebagai berikut :

- a Meningkatkan pemerataan pembangunan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
  - Pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya.
  - Pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil melalui pemberdayaan masyarakat secara langsung, dan jaminan akses terhadap pelayanan publik.
  - Pemanfaatan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.
  - Fasilitasi pembangunan perdesaan melalui pengembangan agropolitan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang, peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi, dan pengembangan social capital dan human capital.
  - Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah untuk dapat menjalankan peran sebagai motor penggerak pembangunan wilayahwilayah sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kota.
  - Peningkatan konektivitas dan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.
  - Pengelolaan pertanahan secara efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah strategis, desa tertinggal dan terpencil, kawasan agropolitan, perkotaan dan industri.
- b Mengurangi kemiskinan dalam masyarakat. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
  - Penelitian dan pengembangan database dan strategi mainstreaming penanggulangan kemiskinan daerah.
  - Perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan khususnya pada layanan akses dan mutu pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
  - Peningkatan pemshaman tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar masyarakat miskin. Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah pedesaan tertinggal dan terpencil, daerah perkotaan dan perbatasan.



- c Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. □ Penataan produk hukum sesuai hirarki perundang-undangan dan kearifan lokal.
  - Penguatan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum.
  - Penegakan supremasi hukum dan HAM, pembangunan budaya hukum, harmonisasi produk hukum pada masyarakat, dan perluasan akses masyarakat terhadap keadilan.
  - Meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum.
  - Penghargaan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan. Adapun prioritas lokasi meliputi daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi.
- d Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tata kelola yang baik ( good governance ) . Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat, dan membentuk kelas menengah yang kuat di bidang ekonomi dan pendidikan.
  - Penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pengembangan diklat aparatur.
  - Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal.
  - Peningkatan kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
  - Penataan fungsi-fungsi positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang merusak.
  - Fasilitasi penguatan pemerintah desa/kelurahan.
  - Peningkatan kualitas kebijakan publik dan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
  - Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-gov; e-procurement; e-bisnis).
  - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan aparatur pemerintah.
- Adapun prioritas lokasi meliputi lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
- e Mengembangkan kapasitas pemerintah daerah. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :



- Peningkatan kapasitas kelembagaan, kapasitas keuangan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.
- Penguatan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan SDA; pemberian kesempatan yang luas untuk menyampaikan aspirasinya, dan peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola ekonomi produktif.
- Peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan pemerintah dan anggota DPRD.

Adapun prioritas lokasi meliputi DPRD provinsi, kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

f Meningkatkan kerjasama antar daerah. Agenda terhadap arah pembangunan

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah.
- Menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.
- Pengkajian potensi dan peluang kerjasama antar daerah.
- Pemanfaatan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah.
- Pengembangan kerjasama antar daerah berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif.

Adapun prioritas lokasi meliputi kabupaten/kota yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

g. Mewujudkan aparatur pemerintah yang baik dan profesional. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Fasilitasi penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah daerah dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur pemerintahan melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.
- Pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta kompetensi para penyelenggara pemerintahan dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan publik.

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

h Meningkatkan peranan komunikasi dan informasi. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Mewujudkan pemerataan akses informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen.



- Pengembangan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas.
- Fasilitasi pengembangan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas dan demokratis.

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

I Mengembangkan proses dan budaya politik. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Membangun kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi melalui berbagai wacana dan media.
- Peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan pejabat publik.
- Fasilitasi dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan.
- Pengembangan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
- Mengembangkan wacana dialog dengan semua stakeholder dalam proses perumusan kebijakan.

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah, pihak swasta, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat.

Indikator keberhasilan dari misi ini adalah tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya konektivitas antar wilayah, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya PDRB per kapita dan indeks nilai tukar petani/nelayan (NTP/NTN), terselenggaranya tata pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), meningkatnya partisipasi politik masyarakat, menurunnya indeks kriminalitas, dan meningkatnya pendapatan asli daerah.

**Misi 4 : Terwujudnya kemandirian dan daya saing daerah**, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang makin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat ditandai dengan meningkatnya IPM serta tidak ada pertumbuhan penduduk karena kelahiran. Angka IPM Nusa Tenggara Barat harus sama/mendekati rata-rata nasional.



2. Terbangunnya struktur perekonomian yang variatif dan kokoh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan komoditi berkualitas dan berdaya saing.
3. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi yang dicirikan oleh terbukanya hubungan antar desa satu sama lain di dalam dan keluar wilayah Nusa Tenggara Barat serta sentra-sentra produksi dengan pasar.
4. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat yang mampu mendukung dinamika ekonomi dan kehidupan masyarakat. Rasio elektrifikasi mencapai angka minimal 95 persen.
5. Meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
  - Perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal.
  - Peningkatan mutu, kuantitas, dan relevansi pendidikan kejuruan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agribisnis, pariwisata, dan keunggulan lokal.
  - Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan link dan match.
  - Peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
  - Pengembangan budaya baca.
  - Peningkatan kualitas dan peran pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.
  - Peningkatan budaya olah raga dan prestasi olah raga di kalangan masyarakat.
  - Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
  - Pencapaian penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi netto (NRR) sama dengan 1, atau angka fertilitas total (TFR) sama dengan 2,1.
  - Memperbaiki indeks pembanguana manusia (IPM)Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kpemerintah desa, pihak swasta, dan kalangan lembaga swadaya masyara
- b. Meningkatkan perekonomian daerah. Agenda terhadap arah pembangun tersebut adalah :
  - Penguatan basis keunggulan komparatif daerah menjadi keunggulakompetitif yang berdaya saing tinggi untuk mendukung iklim usaha yang kondusif.
  - Peningkatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier.
  - Pengembangan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar pusat-pusat pengembangan ekonomi.





- Pengembangan prinsip demokrasi ekonomi yang menjamin kesempataberusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorongtercapainya penanggulangan kemiskinan.
- Pengembangan kelembagaan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Yang baik.
- Peningkatan kualitas pertumbuhan sektor pertanian.
- Pelayanan investasi dan pengembangan investasi di daerah, baik PMDN dan PMA untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas.
- Pengembangan iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.
- Pengembangan usaha kecil menengah (UKM) untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.
- Penguatan struktur perekonomian daerah agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan basis agroindustri dan pariwisata.
- Penjaminan ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan perluasan kesempatan kerja.
- Peningkatan pengelolaan keuangan negara melalui pengelolaan APBD yang bertumpu pada sistem penganggaran yang transparan, akuntabel dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan.
- Peningkatan efektivitas penerimaan asli daerah.
- Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan), kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dan dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketahanan pangan.
- Pembinaan industri yang berdaya saing dengan basis keunggulan komparatif.
- Percepatan berkembangnya industri jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditi ekspor daerah.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis, industri, kawasan ekonomi khusus, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta.

- c. Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Mendukung ketahanan pangan, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  - Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan sumber daya.
  - Pengembangan kapasitas SDM iptek.
  - Peningkatan sumber daya anggaran riset, dan sarana dan prasarana iptek.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis perkotaan, kawasan agribisnis pedesaan, kawasan ekonomi khusus.



d. Membangun jaringan infrastruktur wilayah yang handal dan terintegrasi. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pengembangan perekonomian daerah dan konektivitas antar wilayah.
- Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis, industri, kawasan
- Fasilitasi kegiatan transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui political trading yang saling menguntungkan.
- Fasilitasi pengembangan jaringan pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi.
- Fasilitasi stakeholder untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya.
- Meningkatkan keberpihakan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- Pengembangan infrastruktur perhubungan untuk kegiatan transaksi perdagangan, dan pengembangan jaringan pelayanan inter daantarmoda angkutan sehingga tidak ada lagi bentuk monopoli transportasi.

Adapun prioritas lokal meliputi kawasan strategis, industri, kawasan ekonom khusus, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta.

e. Memenuhi pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di daerah dan keandalannya untuk memulihkan kemampuan pasokan sistem tenaga listrik yang memadai melalui rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru (geothermal).
- Fasilitasi pelunag yang lebih luas bagi investasi swasta secara lebih terbuka, kompetitif, profesional, dan terarah, bagi badan usaha milik negara, dan pemerintah daerah.
- Fasilitasi pemenuhan kebutuhan bagi BUMN, pemerintah daerah dan swasta secara transparan, profesional.

Adapun prioritas lokasi meliputi provinsi, kabupaten, dan kota.

Indikator keberhasilan misi ini adalah meningkatnya kualitas SDM dilihat dari beberapa indikator pendidikan dan kesehatan, meningkatnya prestasi atlet olahraga di berbagai pertandingan dan perlombaan olahraga di tingkat nasional dan internasional, meningkatnya jumlah koperasi bermutu, meningkatnya jumlah wirausaha baru, meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB), peningkatan pertumbuhan dan nilai tambah sektor pertanian, tercapainya kedaulatan pangan di daerah, meningkatnya proporsi anggaran terhadap APBD untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kemandirian jalan, meningkatnya rasio elektrifikasi, meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik, dan berkurangnya ketimpangan antar daerah dan wilayah.



**Misi 5 : Terwujudnya pembangunan berkelanjutan**, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam hayati untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah.
3. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
5. Pengembangan wilayah dalam kerangka membangun geopark, Lombok as Eco Island (LECI) dan Sumbawa as Ecozone (SuEZ).

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025 meliputi :

- a Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam (SDA) yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, perikanan dan perairan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
  - Pengelolaan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab terutama SDA terbarukan yang masih dalam kondisi baik.
  - Pemulihan daya dukung terhadap SDA terbarukan yang sudah dalam kondisi kritis untuk pencadangan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.
  - Penguatan kapasitas unit atau balai konservasi yang bertanggung jawab pada konservasi SDA.
  - Pemanfaatan SDA terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim.
  - Pemantapan kapasitas personal dan kelembagaan konservasi SDA daerah.
  - Sosialisasi terkait dengan pengelolaan SDA yang terbarukan dan terbarukan diikuti dengan penegakan hukum dan sengketa lahan.  
Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, kehutanan, dan perairan.
- b Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan SDA yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi fosil. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
  - Pengkajian dan pengembangan kebutuhan reklamasi, dan konservasi pada areal pertambangan.
  - Memperkuat pendanaan dan pencarian sumber-sumber energi alternative atau bahan substitusi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, panas bumi (geothermal), arus laut, dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan.

- Penguatan kapasitas unit atau balai konservasi yang bertanggung jawab pada konservasi SDA.
- Pemanfaatan SDA terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim.
- Pemantapan kapasitas personal dan kelembagaan konservasi sumber daya alam daerah.
- Sosialisasi terkait dengan pengelolaan SDA yang terbarukan dan terbarukan diikuti dengan penegakan hukum dan sengketa lahan.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, kehutanan, dan kelautan.

- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan SDA yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Pengkajian dan pengembangan kebutuhan reklamasi, dan konservasi pada areal pertambangan rakyat.
  - Memperkuat pendanaan dan pencarian sumber-sumber energi alternative atau bahan substitusi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, panas bumi (geothermal), arus laut dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan.
  - Pengembangan dan pemanfaatan nilai tambah SDA yang optimal, dan outputnya diarahkan untuk dijadikan sebagai kapital kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan kepada sektorsektor lain  
Yang produktif.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan pertambangan di kabupaten, termasuk pertambangan liar.

- d. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Pengkajian potensi sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil beserta pemanfaatannya.
  - Pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya.
  - Peningkatan pengelolaan SDA kelautan secara terpadu antara sector lautan dan daratan.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan pertambangan di kabupaten, termasuk pertambangan liar.

- e. Mewujudkan konservasi sumber daya air. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Pengkajian potensi dan kebutuhan sumber daya air, dan kelembagaan sosial yang mengelolanya.
  - Pelembagaan keberlanjutan daya dukung sumber daya air dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.
  - Pengembangan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalupendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan



konsumsi air dari pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dakeandalan pasokan air.

- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air dengan menerapkan konsekservasi yang menjamin keberlanjutan daya dukung sumber daya yang ada.
- Penguatan kelembagaan pengelola sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- Perlindungan mata air dan air tanah.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan konservasi hutan.

- f. Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis dan kekhasan SDA hayati. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
  - Memberdayakan institusi sosial dan ekonomi terkait dengan pengelolaan SDA di tingkat lokal.
  - Melakukan kajian potensi keanekaragaman hayati.
  - Pengembangan model hutan keanekaragaman hayati dengan mengembangkan dan memberdayakan institusi di tingkat lokal.
- g. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Memanfaatkan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan.
  - Memulihkan dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.
  - Studi sumber-sumber pencemaran untuk mengidentifikasi dan dampak kerusakannya.
  - Memulihkan dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup di kawasan yang berpotensi mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan.
  - Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- h. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Meningkatkan dukungan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dan perluasan penerapan etika lingkungan.
  - Menegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas.
  - Meningkatkan dukungan sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik.
- i. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Meningkatkan kesadaran generasi muda yang peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  - Mempersiapkan penggerak bagi penerapan konsep pembanguna berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

- Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk mencintai lingkungan. Pengembangan dan penerapan kurikulum sekolah yang ramah (pro) terhadap lingkungan hidup.

Indikator keberhasilan dari misi mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah terpeliharanya kualitas lingkungan hidup; terwujudnya pelestarian fungsi tangkapan air, pengelolaan danau/situ/embung; meningkatnya sumber daya alam hayati dimanfaatkan dan diolah untuk agribisnis; meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik dengan sumber energi konvensional dan terbarukan, menurunnya lahan kritis akibat eksploitasi sumber daya alam, menurunnya insiden bencana alam, menurunnya tingkat pencemaran air dan udara dari berbagai sumber pencemaran seperti limbah dan gas buangan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dengan munculnya inisiasi pengelolaan sampah di tiap RT dan dusun.

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari periode keempat pembangunan tahun 2018-2023 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Tahap ke-4 (Periode 2018-2023), adalah periode yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kemajuan di bidang ekonomi yang ditopang oleh ketahanan pangan dan berkembangnya agroindustri terutama pada beberapa komoditi unggulan sejalan

Dalam upaya mencapai Visi Misi pembangunan jangka panjang serta berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi NTB tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD dan mempertimbangkan isu strategis dan identifikasi permasalahan yang ada, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi NTB tahun 2019, adalah:

- a. Percepatan penurunan angka kemiskinan berbasis desa
- b. Pembangunan manusia melalui peningkatan pelayanan dasar
- c. Peningkatan daya saing ekonomi melalui pertanian, pariwisata, industri dan jasa kreatif
- d. Pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi
- e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2019 berada pada periode keempat RPJPD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, maju, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

#### **4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Mataram**

Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun 2017, perkiraan tahun 2018 dan tantangan maupun target tahun 2019 serta permasalahan yang belum dapat diselesaikan sehingga menjadi isu-isu strategis.

Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di Kota Mataram, adalah sebagai berikut:



- cakupan masalah yang luas;
- permasalahan cenderung meningkat di masa mendatang dan berdampak negatif;
- memerlukan upaya penanganan yang konsisten serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh masyarakat Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Mataram 2016-2021 secara umum adalah membangun masyarakat yang beriman dan berbudaya, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pengembangan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur perkotaan berbasis tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

Untuk permasalahan pembangunan Kota Mataram Tahun 2019 dengan mengacu permasalahan yang akan dihadapi pada RPJMD 2016-2021, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang Beriman dan Berbudaya:
  - Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi
  - Masih adanya potensi konflik sosial/horizontal
  - Masih adanya kerawanan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba
  - Makin tingginya tingkat pergeseran/perubahan budaya sebagai dampak perkembangan Teknologi Informasi
  - Belum optimalnya sarana prasarana pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya
2. Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
  - Belum tercapainya pemenuhan indikator pelayanan minimal bidang pendidikan dan kesehatan
  - Belum terpenuhinya proporsi lembaga pendidikan dasar dan menengah pertama yang terakreditasi
  - Belum meratanya distribusi siswa pada sekolah negeri dan swasta
  - Belum adanya kesesuaian antara jumlah lulusan SD pendaftar dengan daya tampung SMP Negeri penerima
  - Masih tingginya jumlah siswa yang berasal dari daerah lain
  - Masih rendahnya pemanfaatan IT dalam proses pembelajaran
  - Masih rendahnya proporsi Guru yang memperoleh sertifikat kompetensi
  - Belum sepenuhnya perilaku masyarakat yang mendukung PHBS
  - Belum tercapainya *universal coverage* Jaminan Kesehatan bagi masyarakat
  - Belum seluruhnya Puskesmas ter-akreditasi
  - Masih tingginya prevalensi penyakit degeneratif
  - Masih adanya wilayah yang rentan KLB Demam Berdarah
3. Pengembangan Ekonomi Lokal
  - Belum optimalnya keberlanjutan penanganan sentra-sentra ekonomi potensial.
  - Belum optimalnya penerapan pelayanan perijinan satu pintu.
  - Belum tersedianya profil dan informasi investasi yang dapat diakses investor.
  - Belum optimalnya pengawasan, pengendalian dan penataan PKL.



- Masih tingginya proporsi Koperasi tidak aktif.
  - Masih rendahnya aksesibilitas pelaku UMKM/Wirausaha Baru (WUB) terhadap sumber permodalan.
  - Masih rendahnya daya saing produk UMKM.
  - Belum optimalnya tata kelola budidaya tanaman pangan.
  - Masih tingginya kelompok usia produktif yang memiliki akses lemah terhadap pasar kerja.
4. Kemiskinan
- Belum optimalnya Pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
  - Masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - Masih tingginya tingkat kerawanan sosial.
  - Belum terjalinnya kemitraan pemerintah dan swasta dalam upaya pengentasan masalah sosial.
5. Infrastruktur Perkotaan Berbasis Tata Ruang
- Masih tingginya luasan kumuh.
  - Belum optimalnya kualitas drainase lingkungan sehingga menyebabkan genangan dan banjir.
  - Kurangnya fasilitas pengolahan limbah rumah tangga khususnya pada kawasan kumuh.
  - Belum meratanya akses air minum pada kawasan kumuh pesisir.
  - Kurang tertatanya kawasan bantaran sungai yang berpotensi menimbulkan kumuh dan banjir.
  - Kemacetan lalu lintas sebagai akibat dari kurang optimalnya sistem pengaturan lalu lintas pada persimpangan, kurangnya layanan angkutan umum dan kurang tertatanya parkir tepi jalan.
  - Masih belum efisiennya penggunaan PJU
6. Lingkungan Hidup
- Belum optimalnya mekanisme pengelolaan persampahan.
  - Kurangnya kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan dan pemilahan sampah pada sumber sampah.
  - Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana/prasarana pengolahan dan pengangkutan sampah.
  - Masih tingginya indeks pencemaran oleh limbah rumah tangga, asap kendaraan bermotor dan industri.
  - Kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau.
  - Kurang optimalnya pengelolaan RTH sebagai Ruang Terbuka Publik yang layak dan berkualitas.
  - Masih kurangnya antisipasi terhadap perubahan iklim
  - Masih kurangnya kesiapsiagaan bencana.
7. Reformasi Birokrasi
- Belum optimalnya penerapan dan evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi.
  - Belum terbentuk dan internalisasi *agent of change*.
  - Belum adanya Perangkat Daerah yang masuk dalam Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
  - Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi.
  - Belum optimalnya pengembangan dan penataan Standar Operasional Prosedur.



- Belum optimalnya pengembangan, penguatan system dan infrastruktur Perangkat Daerah.
- Belum optimalnya pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik

Penetapan Isu Strategis Kota Mataram mengacu pada penentuan permasalahan yang akan dihadapi tahun 2019 serta isu strategis Kota Mataram dalam RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Akses Pelayanan Dasar dan Penurunan Angka Kemiskinan
2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi
3. Penyediaan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Publik
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Situasi Keamanan dan Kerukunan yang Kondusif

Keterkaitan isu strategis dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dengan penetapan isu strategis Kota Mataram tahun 2019 secara rinci ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2  
**Keterkaitan Isu Strategis dalam RPJMD 2016-2021 dengan Isu Strategis RKPD 2019**

ISU STRATEGIS DALAM RPJMD 2016-2021	ISU STRATEGIS DALAM RKPD TAHUN 2019
Budaya (1)	Pemenuhan Akses Pelayanan Dasar dan Penurunan Angka Kemiskinan
Kondusifitas Wilayah (2)	
Kesehatan (3)	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi
Pendidikan (4)	
Daya Saing Perekonomian Daerah (5)	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Publik
Kemiskinan (6)	
Infrastruktur (7)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (8)	
Kependudukan dan Catatan Sipil (9)	Situasi Keamanan dan Kerukunan yang Kondusif
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (10)	

Penetapan isu strategis Kota Mataram tahun 2019 juga diselaraskan dengan penetapan isu strategis dalam RKP tahun 2019 dan isu strategis dalam RKPD Provinsi NTB tahun 2019, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 4.3  
Penyelarasan Isu Strategis Provinsi NTB dengan Isu Strategis Kota Mataram Tahun 2019

ISU STRATEGIS 2019 (RKPD PROVINSI NTB)	ISU STRATEGIS 2019 (RKPD KOTA MATARAM)
1. PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN	1. PEMENUHAN AKSES PELAYANAN DASAR DAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
2. KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA	2. PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI
3. AKSES PELAYANAN DASAR	3. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PEREKONOMIAN DAN PUBLIK
4. PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DAN NILAI TAMBAH EKONOMI SEKTOR PERTANIAN, PARIWISATA DAN JASA PRODUKTIF	4. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
5. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN MITIGASI BENCANA	5. SITUASI KEAMANAN DAN KERUKUNAN YANG KONDUSIF

Tabel 4.3  
Penyelarasan Isu Strategis dalam RKP dengan Isu Strategis Kota Mataram Tahun 2019

ISU STRATEGIS 2019 (RKP)	ISU STRATEGIS 2019 (RKPD KOTA MATARAM)
1. PENURUNAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN SERTA PEMERATAAN PELAYANAN DASAR	1. PEMENUHAN AKSES PELAYANAN DASAR DAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
2. PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS DAN SEKTOR UNGGULAN	2. PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI
3. PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DARI PEMANFAATAN HASIL PERTANIAN, INDUSTRI, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PEREKONOMIAN DAN PUBLIK
4. PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI PRIMER, PANGAN DAN SUMBER DAYA AIR	4. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
5. PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH NASIONAL SERTA PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS	5. SITUASI KEAMANAN DAN KERUKUNAN YANG KONDUSIF

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan lima tahun ketiga, maka prioritas pembangunan Kota Mataram tahun 2016-2021 ditujukan untuk:

1. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang diikuti dengan kesinambungan pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang ditandai dengan:
  - a. terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata pada seluruh wilayah, baik dalam hal kuantitas dan kualitas sehingga menciptakan suasana lingkungan perkotaan yang sehat, bersih dan nyaman;



- b. tertatanya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain dengan mempertahankan sistem jaringan jalan yang tersedia sehingga dapat memacu percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat;
  - c. terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan;
  - d. terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern;
  - e. terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air;
  - f. optimalisasi pemanfaatan dan penataan ruang kota agar dapat terwujudnya penataan dan pola pemanfaatan ruang yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta tercapainya keseimbangan dalam pemanfaatan ruang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lahan dan tercapainya prinsip pembangunan berkelanjutan;
  - g. meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan (makam berbasis taman) yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatnya pelayanan dan pengendalian kebersihan lingkungan perkotaan agar terwujudnya kondisi lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sehat, serta untuk mendukung pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Kesejahteraan rakyat terus membaik seiring meningkatnya kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanding dengan daerah-daerah maju lainnya, yang ditandai dengan:
- a. tersedianya lembaga pendidikan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan fasilitas memadai, termasuk bagi anak berkelainan fisik dan mental;
  - b. meningkatnya peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam bidang pendidikan formal dan non formal;
  - c. membaiknya manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
  - d. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas penguasaan iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek;
  - e. meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat serta terwujudnya pola hidup bersih dan sehat sebagai antisipasi terhadap penyakit menular dan kejadian luar biasa;
  - f. meningkatnya kesetaraan gender;
  - g. meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - h. meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, (efisien dan efektif) serta profesional (*good governance*) yang mampu mendukung pembangunan.
3. Daya saing perekonomian yang didukung Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) dan ekonomi lokal yang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya dukungan SDM yang handal, infrastruktur yang modern (dan moda transportasi yang memadai), iklim usaha yang kondusif, serta kelembagaan ekonomi yang efisien, produktif, pemanfaatan dan penerapan teknologi oleh seluruh pelaku ekonomi. Kondisi ini ditandai dengan:
- a. meningkatnya daya saing produk industri dan jasa dengan daerah lain dalam rangka memasuki era globalisasi;



- b. meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita dan rendahnya atau menurunnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin;
- d. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri kerajinan yang berdaya saing global, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing (Sektor pertanian dengan penguasaan teknologi maju dengan pengaturan sisa lahan yang tersedia. Sektor pariwisata yang bisa menunjang ekonomi masyarakat).

Sasaran strategis pembangunan daerah tahun 2019 difokuskan pada peningkatan dan penanganan terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021, yang terdiri dari 3 (tiga) aspek pembangunan yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kinerja pembangunan daerah yang mendukung pencapaian aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka kemiskinan, angka harapan lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan, pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, skor Pola Pangan Harapan dan tingkat pengangguran terbuka.

2. Aspek Pelayanan Umum

Indikator kinerja pembangunan daerah yang mendukung pencapaian aspek Pelayanan Umum terdiri dari persentase penduduk ber-KTP, persentase balita gizi buruk tertangani, rasio akseptor KB, persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, persentase rumah tangga pengguna air bersih, persentase rumah layak huni, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah dan persentase penanganan sampah.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Indikator kinerja pembangunan daerah yang mendukung pencapaian aspek daya saing daerah terdiri dari target opini laporan keuangan pemerintah daerah, proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah, proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah, target penilaian maturitas SPIP, target kapabilitas APIP, kunjungan wisatawan, angka kriminalitas, cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai standar ombudsman, indeks kepuasan layanan masyarakat, jumlah inovasi pelayanan publik, nilai investasi, dan tingkat perkembangan WUB.

Prioritas Pembangunan Kota Mataram tahun 2019 diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional tahun 2019 dan prioritas pembangunan Provinsi NTB tahun 2019, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.4  
**Penyelarasan Prioritas Pembangunan dalam RKP, RKPD Provinsi NTB dan RKPD Kota Mataram Tahun 2019**

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKPD PROVINSI NTB</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKPD KOTA MATARAM</b>
Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Berbasis Desa	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Dan Penurunan Angka Kemiskinan Berbasis Data Terpadu
Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman	Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Daerah Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, Ekonomi Kreatif Dan Ekonomi Digital
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, Industri Dan Jasa Kreatif	Penyediaan Infrastruktur Perekonomian Dan Publik Berbasis Lingkungan Hidup
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan Dan Sumber Daya Air	Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Mendukung Peningkatan Investasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilihan Umum	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana	Penciptaan Situasi Keamanan Dan Kerukunan Yang Kondusif Dan Berkelanjutan